

## Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Kabupaten Buleleng Selama Pandemi Covid-19

Nyoman Dane

STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja, [nyomandanne@gmail.com](mailto:nyomandanne@gmail.com)

---

### **Abstract**

*Nowadays tourism as one of the drivers of the world economy has positive and negative roles for the survival of nature. The rapid spread of COVID-19 has prompted the government to make various efforts to contain the spread of COVID-19. The implication of this condition has a direct impact on the tourism industry in Buleleng Regency. Based on the problems described, this study aims to examine policies for sustainable tourism development in Buleleng Regency during the Covid-19 pandemic. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data as the basic source of analysis in this study were obtained by using the documentary study data collection technique. This data will then be processed through three stages consisting of data reduction, data presentation / display and drawing conclusions. Based on the results of the study, it was concluded that the tourism sector, which was slumped due to the Covid-19 pandemic, is entering a new normal era. Sustainable tourism will be a consequence of the part of tourism development, after the Covid-19 pandemic is over. Sustainable tourism work is not only sectoral work, but must be comprehensive, whether it be the community, government, academics and others, or what is commonly called pentahelix.*

**Keywords:** *Sustainable Tourism Development Policy and Covid-19*

---

### **1. Pendahuluan**

Pariwisata merupakan salah satu penghasil devisa non migas terbesar di Indonesia. Dalam kegiatannya, pariwisata melibatkan banyak komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, seperti: jasa pelayanan wisata, sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan, dan lingkungan. Aktivitas pariwisata secara tidak langsung melibatkan kehidupan sosial baik itu masyarakat sebagai pengunjung (visitor) dan wisatawan (tourist) maupun penyedia objek pariwisata dan penerima wisatawan. Hubungan sosial masyarakat ini sangat berpengaruh pada perkembangan

kepariwisataan. Pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian dunia, memiliki peran positif dan negatif bagi keberlangsungan hidup alam. Potensi keindahan dan kealamian alam, membuat setiap manusia yang mendatanginya akan selalu mendapat ketenangan serta kesejukan. Disisi lain, adanya manusia yang mendatangi, turut serta dalam eksploitasi kepada alam yang sudah terjaga secara alami serta sebagai habitat para penghuninya. Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang melanda dunia di tahun 2020 pada awalnya disikapi berbeda oleh pemerintah Indonesia, keyakinan bahwa COVID-19 tidak

akan menyebar ke Indonesia memunculkan gagasan dari pemerintah Indonesia untuk memberikan insentif bagi sektor pariwisata agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia meskipun negara-negara ASEAN yang lainnya mulai menerapkan pembatasan kunjungan wisatawan ke negaranya (Sugianto, 2020).

Pada kenyataannya gagasan tersebut menjadi tidak terwujud ketika awal bulan Maret 2020 ditemukan kasus pertama warga negara Indonesia yang terinfeksi COVID-19. Hanya berselang satu bulan dari pengumuman tersebut, COVID-19 menyebar ke banyak kota di Indonesia yang mana korban meninggal mencapai ratusan orang dan bertambah setiap harinya seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 (Yurianto, Pritasari, Wibowo, & Siswanto, 2020). Penyebaran COVID-19 yang cepat mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya penanggulangan penyebaran COVID-19, salah satu upaya tersebut yaitu dengan ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam melalui Keppres 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Implikasi dari ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana alam yaitu kebijakan penanggulangan COVID-19 berada di pemerintah pusat beserta dengan pemerintah daerah yang mana setiap pemangku kepentingan harus tunduk dan taat kepada kebijakan penanggulangan COVID-19 tersebut.

Kabupaten Buleleng sebagai

salah satu daerah yang memiliki kasus infeksi COVID-19 cukup banyak di Provinsi Bali menerapkan berbagai kebijakan dalam upayanya menanggulangi penyebaran COVID-19 agar tidak meluas dan menginfeksi banyak masyarakat. Salah satu kebijakan yang berdampak langsung kepada sektor pariwisata yaitu adanya surat edaran Bupati Buleleng Tertanggal 18 Maret 2020 tentang himbauan untuk sementara tidak melaksanakan kegiatan Operasional Jasa Usaha Pariwisata dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan COVID-19, yang merujuk pada Keputusan Gubernur Bali Nomor : 236/03-B/HK/2020 tanggal 10 Maret 2020 Penetapan Status Siaga Penanggulangan COVID-19 (16-30 Maret 2020). Dalam surat edaran tersebut tercantum 30 (tiga puluh) jasa wisata yang tidak dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya seperti krisna watersport, banyuwedang, dan TNBB sampai dengan area permainan anak, bahkan pemberhentian jasa usaha wisata berlaku juga bagi jasa usaha yang berada di lingkungan perhotelan.

Terhentinya operasional jasa wisata berdampak langsung kepada industri pariwisata di Kabupaten Buleleng, mengingat Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten tujuan wisata di Bali. Kondisi tersebut berlanjut ketika Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai daerah pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang mana segala jenis aktivitas pariwisata secara tegas dilarang sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan

No. HK.01.07/MENKES/259/2020.

Pemberhentian sektor jasa pariwisata tidak hanya terjadi di jenis wisata belanja dan wisata kuliner yang mana Kabupaten Buleleng sudah terkenal dengan jenis wisata tersebut, tetapi juga terhadap jenis wisata lainnya seperti wisata sejarah, wisata alam dan wisata budaya. Implikasi dari kondisi tersebut berdampak langsung kepada industri pariwisata yang ada di Kabupaten Buleleng. Kerugian tidak hanya berdampak kepada penyelenggaraan pariwisata secara langsung, tetapi juga kepada sektor industri penunjang pariwisata seperti jasa transportasi/travel, hotel, dan lain sebagainya. Meskipun banyak pihak memprediksi bahwa COVID-19 bisa berlangsung sepanjang tahun 2020, akan tetapi kerugian bagi industri pariwisata sudah bisa dirasakan dampaknya pasca diberlakukannya kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

Sektor pariwisata yang paling berimbas adalah perhotelan. Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Buleleng mengakui, sektor perhotelan terkena imbas wabah virus Corona. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Buleleng menjelaskan, bahwa angka hunian hotel di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan drastis sejak wabah virus corona terjadi di berbagai negara. Hingga saat ini tingkat hunian hotel di Kabupaten Buleleng hanya terisi sebesar 30 persen. Padahal, angka normal tingkat hunian hotel pada 2019 rata-rata mencapai 60 sampai 70 persen.

Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Buleleng tengah

menyiapkan strategi guna mendorong pelaku industri pariwisata menggunakan konsep berkelanjutan (*sustainable tourism*), karena selain memiliki nilai kebermanfaatan ekonomi, pola pariwisata keberlanjutan memberi kontribusi langsung bagi kegiatan konservasi. Penerapan program *Sustainable Tourism for Development* (STDev) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang mengadopsi standar internasional dari *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC). Implementasi pariwisata berkelanjutan adalah tugas yang sangat berat dan tak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Namun kelompok sadar wisata (pokdarwis) harus dilibatkan secara serius untuk membangun fondasi dan merealisasikan pariwisata berkelanjutan.

Dalam rangka merealisasikan program pariwisata berkelanjutan Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Buleleng akan membahas mengenai konsep ini bersama pihak yang terlibat dalam ekosistem industri pariwisata. Diantaranya, pelaku usaha, hotel, masyarakat, budayawan dan akademisi. Dengan melalui sistem pariwisata terpadu (siparu), diharapkan, tahun depan konsep wisata berkelanjutan banyak diterapkan di berbagai wilayah khususnya di Kabupaten Buleleng.

Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) dinilai sebagai aspek terpenting bagi pengembangan sektor pariwisata di era kenormalan baru pascapandemi COVID-19. Aspek tersebut diterapkan seiring

kebijakan protokol kesehatan yang ditunjang oleh kesiapan-kesiapan di daerah-daerah tujuan wisata. Plt. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan

Kemenparekraf/Baparekraf, Frans Teguh menjelaskan, pariwisata berkelanjutan akan menjadi sebuah pilihan dan konsekuensi dari bagian pengembangan pariwisata, setelah pandemi COVID-19. Menurutnya, ke depan yang perlu diperkuat yakni bagaimana pariwisata berpusat kepada manusia atau *people-centered tourism* atau *community based tourism* yang mencakup peningkatan diversifikasi produk, pelayanan sesuai dengan kebutuhan perilaku masyarakat, pola pelayanan serta upaya meningkatkan kekuatan kearifan lokal yang akhirnya menjadi *unique selling point*. Hal itu yang harus dijaga, dirawat dan dikelola dengan dukungan kualitas sumber daya manusia ke depan. Selain itu perlu diterapkan nilai keberlanjutan domestik seperti resiliens dan kearifan lokal, serta pariwisata yang berkeeseimbangan.

Penerapan pariwisata berkelanjutan lebih luas dibutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Saat ini, para pihak pariwisata memiliki momentum untuk untuk membenahi, menata dan menyiapkan strategi dan langkah *reopening* atau *rebound* pemulihan pariwisata. Pemerintah menawarkan konsep dan strategi untuk mengaplikasikan skema dan pola pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan parameter dan indikatornya secara komprehensif termasuk dalam upaya penanganan

krisis dan aspek kebersihan, kesehatan dan keselamatan. Progran pariwisata berkelanjutan bukan hanya kerja sektoral, tapi harus menyeluruh baik masyarakat, pemerintah, akademisi, dan lainnya, atau yang biasa kita sebut *pentahelix*. Berbagai disiplin ilmu dan *stakeholder* harus bekerja bersama-sama dan memperbaiki aspek tata kelola, aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan untuk meningkatkan daya saing, reputasi dan kepercayaan publik serta nilai keberlanjutan sumber daya kepariwisataan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Buleleng selama pandemi Covid-19.

## 2. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu tanpa menggunakan hipotesa yang telah dirumuskan secara ketat (Singarimbun, 2013). Penelitian kualitatif mempunyai tujuan agar peneliti lebih mengenal lingkungan penelitian, dan dapat terjun langsung ke lapangan sebagai *key instrument* (instrumen kunci). Jennings (2011) menjelaskan penelitian kualitatif berhubungan dengan paradigma holistik-induktif yang menginterpretasikan permasalahan sosial dalam ranah *paradigma post modern*. Nana Syaodih Sukmadinata (2015) menyatakan bahwa penelitian

kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.

Sumber data dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi (*documentary study*) yang mana berbagai data yang dianggap relevan dengan penelitian yang tengah dilakukan bersumber baik dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, laman web dan sumber referensi lainnya. Data ini kemudian akan diolah melalui tiga tahapan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data/display dan penarikan kesimpulan Creswell (2014). Kemudian data tersebut akan dilakukan pengujian untuk menghasilkan gambaran yang real dan benar sesuai dengan kondisi yang ada melalui teknik triangulasi yang meliputi tahap *check*, tahap *re-check* dan tahap *cross-check* (Sugiyono, 2018).

### 3. Pembahasan

COVID-19 yang sudah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia disikapi dengan penetapan bencana nasional COVID-19 oleh pemerintah, status tersebut didasarkan kepada bayakannya warga masyarakat yang terinfeksi COVID-19, bahkan ratusan orang meninggal disebabkan oleh COVID-19 tersebut. Kondisi wabah COVID-19 diperparah dengan belum diketemukannya obat dan vaksin anti COVID-19, berbagai pihak memprediksi bahwa penyebaran

COVID-19 akan berlangsung sepanjang tahun 2020. Dalam konteks pariwisata, COVID-19 yang disusul dengan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) berimplikasi kepada berhentinya seluruh kegiatan pariwisata yang ada di Kabupaten Buleleng yang tentunya berimplikasi pula pada kerugian ekonomi di sektor pariwisata.

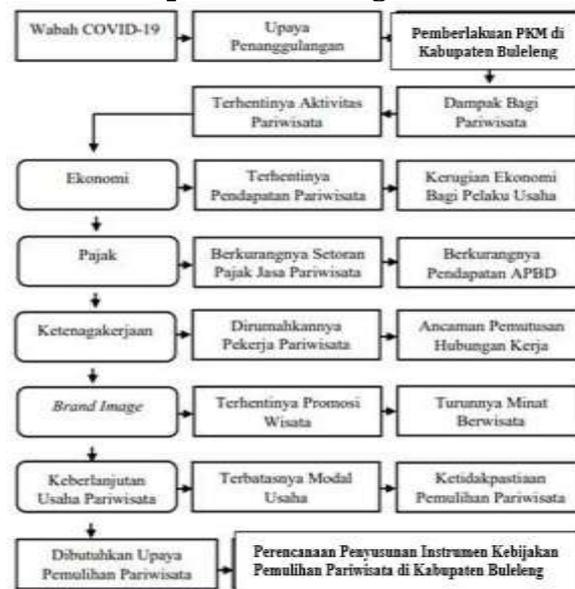
Kabupaten Buleleng saat ini menjadi kabupaten dengan memiliki tiga wisata unggulan yang ada di provinsi Bali, tidak heran apabila pariwisata di Kabupaten Buleleng sering direpresentasikan sebagai pariwisata dengan keunikannya bagi provinsi Bali yang mana banyak jenis pariwisata yang ada di provinsi Bali bisa dilihat dan dirasakan hanya dengan berkunjung ke Kabupaten Buleleng semata. Pariwisata di Kabupaten Buleleng secara empiris tidak hanya terpusat di obyek wisata pantai Lovina semata, tetapi di beberapa tempat atau kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Buleleng. Implikasi bagi sektor pariwisata yaitu secara empiris pariwisata tidak hanya dikembangkan di Kabupaten Buleleng semata, tetapi di beberapa Kabupaten lainnya di Provinsi Bali.

Kabupaten Buleleng memiliki banyak objek wisata yang dapat dijadikan daya tarik pariwisata bagi para wisatawan baik yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri. Kawasan pariwisata yang ada di Kabupaten Buleleng tidak hanya terbatas kepada jenis pariwisata yang memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga bervariasi sampai dengan jenis

pariwisata spiritual, adat dan budaya. Berbagai Kawasan yang menunjang pariwisata di Kabupaten Buleleng pada akhirnya menjadikan Kabupaten Buleleng sebagai tempat wisata yang tidak hanya diakui secara nasional, tetapi juga internasional dengan banyaknya wisatawan asing yang bermukim di sekitaran pantai lovina, desa pemuteran, desa sembiran dan daerah lainnya di Kabupaten Buleleng.

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kabupaten Buleleng yang salah satu aturannya melarang kegiatan pariwisata di satu sisi harus didukung guna menanggulangi penyebaran COVID-19, akan tetapi di sisi lain tidak dapat dipungkiri memberikan kerugian kepada pariwisata itu sendiri yang mana semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha sampai dengan pekerja di sektor pariwisata merasakan kerugian tersebut. Pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Buleleng telah memberikan pemasukan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui pajak jasa pariwisata, serta telah membuka lapangan pekerjaan dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi banyak masyarakat. Dengan berhentinya aktivitas pariwisata yang ada di Kabupaten Buleleng, maka dampak yang ditimbulkannyapun mencakup banyak aspek yang saling terkait satu dengan yang lainnya.

**Gambar. Dampak Wabah COVID-19 di Kabupaten Buleleng**



Berdasarkan Gambar di atas, setidaknya terdapat 5 (lima) aspek yang terdampak COVID-19 bagi sektor pariwisata, yaitu: Pertama, aspek ekonomi yang mana berhentinya aktivitas pariwisata di Kabupaten Buleleng secara otomatis menghentikan pemasukan dari jasa pariwisata, hal ini tentu saja memberikan kerugian ekonomi bagi para pelaku usaha pariwisata yang selama ini mendapatkan penghasilan dari sektor pariwisata. Kerugian ekonomi dari berhentinya aktivitas pariwisata berimplikasi kepada aspek lainnya dikarenakan meskipun tidak mendapatkan penerimaan dari jasa pariwisata tetapi aktivitas pengelolaan pariwisata tetap berjalan seperti pemeliharaan fasilitas pariwisata, pembayaran iuran air dan listrik, pengajihan karyawan baik yang masih bekerja maupun yang dirumahkan dan lain sebagainya. Kondisi tersebut membuat ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran bagi

para pelaku usaha pariwisata, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi para pengusaha yang mengalami kerugian besar, memiliki beban untuk mengembalikan kegiatan pariwisata (Permana, 2020).

Kedua, aspek pendapatan pajak yang mana pariwisata di Kabupaten Buleleng tahun 2019 menyumbang sebesar 4.113.673.000,- atau setara dengan 1,13% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng (Pekab Buleleng, 2019). Ketiga, aspek ketenagakerjaan merupakan aspek yang terdampak wabah COVID-19 yang mana pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) secara otomatis menghentikan banyak pekerjaan di sektor pariwisata. Pelaku usaha merumahkan para pekerja dengan tetap menggaji sebagaimana ketentuan peraturan pemerintah, akan tetapi tidak sedikit dari para pekerja yang dirumahkan tersebut tidak mendapatkan kepastian akan dipekerjakan kembali pasca wabah COVID-19. Keempat, brand image dalam pariwisata merupakan aspek yang penting dikarenakan adanya citra yang baik selain akan memunculkan kesan positif juga akan meningkatkan keinginan berkunjung dari para wisatawan. Kelima, keberlanjutan usaha pariwisata menjadi aspek yang harus dipertanyakan ketika aktivitas pariwisata terhenti, apakah berbagai jenis pariwisata yang selama ini terselenggara akan tetap bertahan dan pulih pasca wabah COVID-19 atau sebaliknya ditutup dikarenakan tidak bisa melakukan proses

pemulihan pasca COVID-19.

Sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 tengah memasuki era normal baru. Perubahan paradigma tengah berlangsung dan sejumlah protokol baru akan diterapkan untuk menyambut kondisi normal baru di industri pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengemukakan, sektor pariwisata yang menyerap banyak lapangan kerja sangat terpukul akibat pandemi Covid-19. Sementara sulit untuk memprediksi kapan pandemi tersebut akan berakhir. Akan tetapi, industri pariwisata harus terus berlanjut dan memasuki era normal baru. Era normal baru membawa peran baru, jalan baru, dan ekspektasi di sektor pariwisata. Digitalisasi berkembang cepat di luar dugaan. Bisnis pariwisata harus beradaptasi terhadap kondisi yang baru serta mengatur kembali strategi model bisnis agar bisa bertahan di era normal baru, dengan menyesuaikan perkembangan teknologi (Grahadyarini, 2020).

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk melakukan inovasi dan perbaikan di sektor pariwisata. Sehingga dengan adanya perubahan tren di pariwisata global saat ini diharapkan Indonesia mampu beradaptasi. Dalam hal ini perubahan tren di pariwisata akan bergeser ke alternatif liburan yang tidak banyak orang seperti *solo travel tour*, *virtual tourism*, serta *staycation* dimana isu *health*, *hygiene*, dan *safety* akan menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan yang ingin berwisata. Kemudian bagi para pelaku industri

pariwisata dan ekonomi kreatif harus betul-betul mengantisipasi dan tidak tergesa-gesa untuk membuka destinasi wisata agar tak ada lagi *imported case* yang dapat berdampak buruk pada citra pariwisata. Disamping itu media memiliki peran yang penting dalam pembentukan stigma masyarakat terutama di masa pandemi saat ini. Media menjadi salah satu pusat jembatan informasi antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk informasi mengenai perkembangan sektor pariwisata yang seharusnya dapat menjadi harapan bagi masyarakat untuk *survive* dan bersiap memulai New Normal dengan protokol khusus sektor pariwisata. Namun realitanya justru banyak berita negatif yang beredar, tingginya antusiasme masyarakat dalam memandang berita panas seperti angka kematian menyebabkan media terus menggoreng isu tersebut untuk mendapat *travic* penonton dengan jumlah yang tinggi, sehingga terbentuk kepanikan masyarakat yang membuat sebagian masyarakat kehilangan harapan untuk bertahan di situasi sulit seperti saat ini (Warta Ekonomi, 2020).

Pariwisata berkelanjutan akan menjadi sebuah konsekuensi dari bagian pengembangan pariwisata, setelah pandemi Covid-19 selesai. Ditutupnya destinasi wisata akibat wabah harus menjadi momentum bagi para pengelola destinasi di Tanah Air untuk dapat mengevaluasi dan menata ulang tempat wisatanya, sehingga menghadirkan kesan yang lebih baik untuk wisatawan termasuk mulai menerapkan pariwisata berkelanjutan.

Setelah pandemi berlalu akan hadir kondisi "new normal" atau tren baru dalam berwisata, yang mana wisatawan akan lebih memperhatikan protokol-protokol wisata, terutama yang terkait dengan kesehatan, keamanan, kenyamanan, *sustainable and responsible tourism, authentic digital ecosystem*, dan lainnya. Dalam penerapan pariwisata berkelanjutan terdapat pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh *Global Sustainable Tourism Council*. Indonesia juga secara aktif berkoordinasi dengan UNWTO hingga terbentuknya ISTC. Bahkan pemerintah juga telah menyusun pedoman dalam penerapan pariwisata berkelanjutan melalui Permenpar Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Kemenparekraf pun telah memiliki *framework* dan *action plan*, hingga sertifikasi yang bekerja sama dengan universitas. Usaha-usaha tersebut diharapkan dapat menumbuhkan *sustainable tourism destination* di berbagai daerah Tanah Air. Banyak penggiat pariwisata, pelaku desa wisata, serta komunitas yang telah berhasil menerapkan pariwisata berkelanjutan sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam perkembangan ekonomi maupun pengembangan secara umum.

Kerja pariwisata berkelanjutan bukan hanya kerja sektoral, tapi harus menyeluruh baik masyarakat, pemerintah, akademisi dan lainnya, atau yang biasa disebut *pentahelix*. Berbagai disiplin ilmu harus bekerja

bersama-sama dan memperbaiki pendekatan- pendekatan kita untuk tidak hanya meningkatkan daya saing tapi juga daya keberlanjutan dari kegiatan kepariwisataan. Pariwisata berkelanjutan akan menjadi peluang yang sangat besar ke depan, terutama pascapandemi, karena selain menjadi kebutuhan wisatawan dari sisi investasi juga tidak terlalu besar. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan kearifan lokal di daerah masing-masing sebagai upaya membangun pariwisata berkelanjutan di era adaptasi kebiasaan baru.

Urgensi pemulihan pariwisata sebagaimana dijelaskan di atas membutuhkan suatu perencanaan yang disusun secara baik agar dalam proses pelaksanaan pemulihan pariwisata dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah dalam konteks pemulihan pariwisata memegang peran yang penting sebagai institusi resmi yang berwenang menyusun dan menetapkan kebijakan rencana pemulihan pariwisata, meskipun demikian berbagai pihak yang terlibat dalam pariwisata harus turut dilibatkan, mengingat keberhasilan pemulihan pariwisata merupakan kerjasama multi-aktor yang menuntut kerjasama dan sinergitas yang baik antar pemangku kepentingan. Instrumen kebijakan yang lahir sebagai output perencanaan pemulihan pariwisata di Kabupaten Buleleng merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh 3

(tiga) pihak yang dalam hal ini pihak pertama yaitu Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai otoritas yang akan mengesahkan instrumen kebijakan pemulihan pariwisata, pihak kedua yaitu pelaku usaha dalam pariwisata yang ada di Kabupaten Buleleng yaitu perusahaan jasa pariwisata dan pengusaha pariwisata baik perorangan maupun berasal dari kelompok masyarakat dan pihak ketiga yaitu para pemerhati pariwisata dan akademisi yang mana kontribusi pemikirannya dapat dijadikan input penyusunan kebijakan pemulihan pariwisata meskipun secara empiris tidak terkait langsung dalam penyelenggaraan pariwisata. Upaya pemulihan pariwisata pasca wabah COVID-19 tidak hanya melalui penyusunan instrumen kebijakan semata, tetapi juga harus diimbangi dengan adanya perbaikan secara internal dalam organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng guna memastikan bahwa pemulihan pariwisata tidak hanya ditujukan secara eksternal bagi para pelaku usaha pariwisata, tetapi juga meliputi upaya perbaikan secara internal (Herdiana, 2020).

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*) merupakan sebuah isu dan telah menjadi visi pengembangan pariwisata di dunia saat ini dan masa datang. Hal ini secara tegas telah disampaikan oleh UNWTO dengan merekomendasikan pedoman dan manual penerapan pembangunan pariwisata secara berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pedoman dasar bagi pengelola pariwisata yang

berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan binaan, dan lingkungan sosial budaya agar dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar upaya komersialisasi (ekonomi) selaras dengan upaya konservasi sumber daya agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Disamping itu, perlunya pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan juga terkait dengan semakin meningkatnya apresiasi konsumen yang semakin tinggi dan menuntut suatu destinasi wisata untuk memperhatikan keseimbangan kualitas lingkungan dan sosial budaya dengan pengembangan ekonomi (Paramita & dkk, 2020).

Untuk menumbuhkan daya saing pada penerapan konsep pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Buleleng, secara operasional dilakukan dengan menggunakan kombinasi *resource-based approach* dan *market-based approach*, dengan pemahaman bahwa secara umum *resource-based approach* dikembangkan dengan mengadopsi pemahaman akan kecenderungan pasar dan lingkungan strategis. Implementasi Konsep Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Buleleng dikembangkan dengan kesadaran bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang memiliki ciri pengembangan melalui ketersediaan dan kemampuan sumberdaya pariwisata, kemampuan wilayah, pengorganisasian, dan masyarakat (Paramita, 2020).

Pembangunan pariwisata melalui pendekatan ini diyakini akan

lebih dapat diterima oleh masyarakat dan memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab, dengan tetap memiliki manfaat ekonomi serta menciptakan *multiplier effect* yang tinggi. Oleh sebab itu, pengembangan pariwisata di Kabupaten Buleleng perlu mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor yang saling berkait dan yang diperkirakan akan menjadi faktor pengganggu. Dalam mengembangkan Kabupaten Buleleng sebagai destinasi pariwisata, tidak hanya aspek daya tarik sebuah hal yang paling esensial namun aspek- aspek lain perlu diperhatikan.

*Sustainable Development* merupakan prinsip bersama dari sebuah pembangunan yang perlu untuk diterapkan dalam setiap perencanaan pembangunan. Dari pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan peran para wisatawan dalam mempromosikan sebuah destinasi wisata. Pembangunan berkelanjutan bukan hanya sebagai prinsip pembangunan, namun juga sebagai sebuah media promosi pariwisata. Dengan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan bertujuan agar para wisatawan puas dengan kegiatan berwisata, juga sebagai penarik untuk wisatawan internasional untuk mau berkunjung ke Kabupaten Buleleng. Pariwisata berkelanjutan bukan hanya sebagai prinsip pembangunan namun dapat memberikan dampak yang baik untuk promosi pariwisata kepada masyarakat lokal maupun internasional untuk kunjungan yang lebih meningkat. Salah satunya adalah pembangunan yang baik dan

memperhatikan keberlanjutan akan menghasilkan kenyamanan dari wisatawan sehingga mereka puas terhadap kunjungan mereka dan akan melakukan kunjungan ulang.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 tengah memasuki era normal baru. Perubahan paradigma tengah berlangsung dan sejumlah protokol baru akan diterapkan untuk menyambut kondisi normal baru di industri pariwisata. Pariwisata berkelanjutan akan menjadi sebuah konsekuensi dari bagian pengembangan pariwisata, setelah pandemi Covid-19 selesai. Ditutupnya destinasi wisata akibat wabah harus menjadi momentum bagi para pengelola destinasi di Tanah Air untuk dapat mengevaluasi dan menata ulang tempat wisatanya, sehingga menghadirkan kesan yang lebih baik untuk wisatawan termasuk mulai menerapkan pariwisata berkelanjutan. Dalam penerapan pariwisata berkelanjutan terdapat pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh *Global Sustainable Tourism Council*. Penerapan pariwisata berkelanjutan juga diatur melalui Permenpar Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Kerja pariwisata berkelanjutan bukan hanya kerja sektoral, tapi harus menyeluruh baik masyarakat, pemerintah, akademisi dan lainnya, atau yang biasa disebut *pentahelix*. Untuk

menumbuhkan daya saing pada penerapan konsep pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Buleleng, secara operasional dilakukan dengan menggunakan kombinasi *resource-based approach* dan *market-based approach*, dengan pemahaman bahwa secara umum *resource-based approach* dikembangkan dengan mengadopsi pemahaman akan kecenderungan pasar dan lingkungan strategis.

#### Daftar Pustaka

- Pemkab Kabupaten Buleleng.  
*Laporan Pendapatan Retribusi DTW Tahun 2019*
- Burkart and Medlik. 2013. *Tourism Pas, Present, and Future*, 18nd edition. London: Heinemann.
- Creswell, John W. 2014. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta : pustaka pelajar.
- Violetta Simatupang dan Sukmadi. *Analisis Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Kota Bandung Selama Pandemi Covid-19*. Open Journal Systems Vol.15 No.6 Januari 2021.
- Gamal, Suwanto, 2012. *Dasar-Dasar Pariwisata. Edisi ke VII*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Herdiana, Dian. 2020. *Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Pariwisata Pasca Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bandung*. JUMPA Volume 7, Nomor 1, Juli 2020.
- Jennings, GL. 2011. *Exercise and hypertension*. Philidelphia: ElsevierSaunders

- Keppres 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
- Kodhyat, H. 2012. *Sejarah Pariwisata Dan Perkembangannya Di Indonesia. Cetakan ke-7*. Jakarta: Grasindo.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Paramita, I. B. (2020). New Normal Bagi Pariwisata Bali Di Masa Pandemi Covid 19. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya*, 57-65.
- Paramita, I. B., & Dkk. (2020). Stereotip Etnis Tionghoa Di Banjar Sandakan, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. *Maha Widya Duta*, 81-89.
- Pitana, I Gde. dan Surya Diarta, I Ketut. 2013. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Singarimbun, M. 2013. *Metode penelitian Survei. Edisi ke XI*, Jakarta. LP3ES.
- Sugianto, Danang. 2020. "Geger Corona, Kok RI Malah Tarik Banyak Wisman?." Retrieved April 28, 2020, from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d4921764/geger-corona-kok-ri-malah-tarik-banyak-wisman>. diakses 22 Juni 2020.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Reseach and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Yurianto, Achmad, Kirana Pritasari, Bambang Wibowo, and Siswanto. 2020. *Pedoman Penanganan Cepat Medis Dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 Di Indonesia*. Jakarta: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.